



BIRO PIWPP SETDA DIY

Kawasan Kumuh Tinggal 57,7 Hektare

80 Persen di Bantaran Sungai

PERKEMBANGAN Kota Yogyakarta dalam empat dekade terakhir cukup pesat. Dengan luas yang hanya 32 kilometer persegi, permukiman penduduk kian meningkat menambah padat. Sampai akhirnya berkembang menjadi kawasan kumuh. Terutama bantaran sungai.

Bahkan, berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kota Yogyakarta, tahun 2016 itu masih sekitar 264,9 hektar di seluruh kota Yogyakarta.

"Delapan puluh persen di dataran tadi. Nah, kempyidan sampai tahun 2025 ini, sisa kumuhnya tinggal 57,7 hektare," kata

Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman DPUPKP Kota Yogyakarta Sigit Setiawan, ST., M.Eng, saat Podcast Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan (PIWPP) DIY, (22 Agustus 2025).

Sigit menjelaskan, berkurangnya kawasan kumuh itu karena memang ada penanganan sesuai dengan tujuh indikator penilaian. Antara lain mengenai saluran limbah langsung ke sungai, akses jalan, drainase lingkungan, bangunan, penyediaan air minum, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran.

"Kami lakukan pembangunan antara lain menyiapkan saluran air minum dari PDAM Tirtamarta, saluran limbah



BERKEMBANG: Kawasan tempat tinggal yang berada di wilayah Kota Yogyakarta.

atau pembangunan IPAL Komunal, pengelolaan sampah, semuanya kami perbaiki," jelasnya.

Ia menegaskan, penataan kawasan kumuh tak bisa hanya pemerintah

sendiri. Dari yang telah dilaksanakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, pembangunan fasilitas akses jalan lingkungan menjadi perhatian.

"Harus ada kesadaran

dari warga untuk bersedia lahannya dibangun akses jalan," katanya.

Mayoritas kawasan kumuh di Kota Yogyakarta berada di bantaran sungai. Yaitu, Kali Winongo, Kali

Code, dan Kaki Gajahwong. Seluruh kawasan kumuh yang telah ditingkatkan ini bersedia memundurkan bangunannya untuk dibangun akses lingkungan.

Anggota Komisi C DPRD DIY Muhammad Lisman Puja Kesuma, S.P., menegaskan, kesadaran masyarakat harus ditingkatkan. Jadi, usai kawasan kumuh ini ditingkatkan, warga secara suka rela turut merawat.

"Memang perlu dibangun kesadaran warga. Agar jangan sampai mereka juga memahami bahwa kawasannya kumuh tidak sehat. Perlu pendekatan agar tidak kumuh lagi," katanya.

Lisman menambahkan, pihaknya sebagai wakil rakyat akan memelototi pembangunan kawasan kumuh ini disandingkan dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW).

"Sesuai tidak dengan RTRW?" katanya.

Begitu pun dengan anggaran. Lisman menegaskan, wakil rakyat akan melihat sejauh mana dukungan anggaran terhadap peningkatan kawasan kumuh ini.

"Dari anggaran tentu kita lihat bagaimana dukungannya?" jelasnya.

Analisis Kebijakan Ahli Muda Biro PIWPP Setda DIY Karyanti Pratiwi, S.T., M.T. mengatakan, setiap kebijakan atau kegiatan penataan kumuh ini sudah ada rencana kerja yang jelas. Ini dituangkan dari perencanaan penataan kawasan.

"Siapa berbuat apa? Itu ada dalam perencanaan. Bahkan, lebih detail terkait dengan anggaran," paparnya. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005